

PAKAIAN-DINAS	
2025	
PERBUB KAB.NGANJUK NO.1, BD 2024/NO.1, 63 HLM	
PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK	
ABSTRAK	<ul style="list-style-type: none"> - a. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaan pakaian dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Nganjuk perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban b. bahwa Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk belum mengakomodir kebutuhan organisasi terhadap penggunaan pakaian dinas dan atribut pakaian dinas bagr Aparatur Sipil Negara, sehingga perlu diganti c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati Nganjuk tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk
	<ul style="list-style-type: none"> - Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024; Peraturan Daerah KabupatenDaerah Tingkat II Nganjuk Nomor 11 Tahun 1995; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023; Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022; Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022.
	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pakaian Dinas ASN yang terdiri atas Pakaian Dinas Harian Khaki, Pakaian Dinas HArian Kemeja Putih, dan pakaian Dinas Harian Baik/Tenun/Lurik atau Pakaian Khas Daerah. Atribut dan kelengkapan pakaian dinas, pendanaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari APBD. Untuk ASN yang berhijab dan hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan pakaian dinas
CATATAN	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Januari 2025; - Mencabut Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2021; - Lampiran sebanyak 52 hlm.